



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NYOMAN WARA
2. Jabatan : INSPEKTUR UTAMA
3. NHK : 168618

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.548.100.000

1. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 7.700.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/140 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/48 m2 di KAB / KOTA
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 663.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 296.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
32.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 913.910.253



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.958.010.253
III. HUTANG	Rp.	548.791.287
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.409.218.966

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.